
Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Belanja Modal

Sugianoor*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*sugianoor.ulm@gmail.com

Abstract

This research aimed to analyze the effect of local taxes, levies, balance funds, and SiLPA on capital expenditures. The population used in this study were districts/cities in South Kalimantan, this study used quantitative research methods, and this data analysis technique used panel data with multiple linear regression and secondary data for nine years (2011-2019). Capital expenditures have an important role in improving public services, such as increasing the value of assets and obtaining assets, and improving public facilities with regional expenditures, which are effective in increasing the regional economy, such as increasing the useful life or adding value to road and bridge, irrigation and network assets.

In the results of this study, the results of the linear regression analysis conducted show that the variables of Local Taxes and levies on districts and cities in South Kalimantan are not significant to capital expenditure and have a positive value, which means that the variables of Regional Taxes and Regional Levies have a significant relationship direction of Capital Expenditures but has no effect on Capital Expenditures. Balanced Funds in districts and cities in South Kalimantan have a positive value and significant effect on capital expenditure. Silpa in districts and cities in South Kalimantan has a significant positive effect on capital expenditure, which means that the Balanced Fund and SiLPA variables have a unidirectional relationship, meaning that it decreases. -the increase in the Balancing Fund and SiLPA variables in districts and cities in South Kalimantan affects capital expenditure.

Keywords: *Local Taxes; Regional Retribution; Balancing Funds; SiLPA; Capital Expenditures.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan, bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Belanja Modal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan teknik analisis data ini menggunakan data panel dengan regresi linear berganda dan menggunakan data sekunder dalam jangka waktu 9 tahun (2011-2019). Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik seperti dapat menambah nilai aset dan memperoleh aset, meningkatkan fasilitas umum dengan pengeluaran belanja daerah yang efektif untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti meningkatkan masa manfaat atau menambah nilai aset jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Pada hasil penelitian ini, dengan hasil analisis regresi linear yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan retribusi daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan memiliki nilai yang positif, yang berarti pada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki hubungan yang searah terhadap Belanja Modal tetapi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan memiliki nilai yang Positif, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan SiLPA pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, yang berarti pada variabel Dana Perimbangan dan SiLPA memiliki hubungan yang searah artinya turun-naiknya variabel Dana

Perimbangan dan SiLPA pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : *Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Dana Perimbangan; SiLPA; Belanja Modal.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah khususnya pada kabupaten/kota merupakan awal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, dan untuk meningkatkan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan APBD, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum, pengadaan tersebut didapat melalui belanja modal dimana pendanaannya didapat melalui pendapatan daerah, perwujudan itu dapat dilaksanakan dengan penetapan APBD, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia dan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kalimantan selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dengan ibukota Banjarmasin yang dijuluki kota seribu sungai dengan luas wilayah $98,46 \text{ km}^2$ dan berdasarkan data BPS kota Banjarmasin tahun 2016, kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km^2 , secara keseluruhan provinsi kalimantan selatan memiliki penduduk 4,2 juta jiwa (2019) dengan luas wilayah sebesar $37.530,52 \text{ km}^2$. pada pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di kalimantan selatan jumlah penduduk per-jiwa semakin meningkat tiap tahunnya, Berkaitan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar untuk mensejahterakan penduduk pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan pembangunan pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur yang baik agar masyarakat dapat membuat perkembangan perekonomian jadi lebih baik. Belanja daerah dalam anggaran APBD diharapkan pendanaan pendapatan daerah dapat mempengaruhi belanja daerah khususnya pada belanja modal karena dapat memperoleh aset dan menambah nilai aset sehingga dapat memajukan infrastruktur pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Belanja Daerah

Undang-undang no 33 tahun 2004, semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan merupakan Belanja daerah. Komposisi secara Nasional dari belanja daerah pada APBD dibagi menjadi 4 bagian utama yaitu : Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya.

Belanja Modal

Permendagri no 33 tahun 2019, Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan/pembelian perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapasitas aset. Dapat dilihat dalam komponen utama APBD secara Nasional pada Belanja Daerah, belanja yang dapat dioptimalkan pada APBD yang dapat meningkatkan pelayanan publik seperti Belanja Modal dapat menambah nilai aset dan memperoleh aset untuk meningkatkan fasilitas umum dengan pengeluaran belanja daerah yang efektif untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti menambah nilai aset dan meningkatkan masa manfaat jalan dan jembatan, jaringan dan irigasi.

Pajak Daerah

Undang-undang Republik Indonesia no. 28 tahun, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah merupakan pajak daerah. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah sebagai penerimaan pajak daerah. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu yang digunakan untuk menjalankan program-program kerjan pemerintah.

Retribusi Daerah

Undang-undang no. 28 tahun 2009, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan merupakan arti dari retribusi daerah. Retribusi daerah sebagaimana pajak daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah merupakan dana perimbangan atau pendapatan transfer. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah. Dana perimbangan terus meningkat setiap tahunnya, pendanaan tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

SiLPA

SiLPA (dengan huruf i kecil) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran, yang dimana SiLPA ialah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Permendagri no.33 tahun 2019 Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Undang-undang no.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SiLPA merupakan sumber pembiayaan defisit pada APBD dan digunakan apabila defisit mencapai 3% atau tidak lebih dari 3%.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Khoirul Ifa (2017), dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur” pada penelitian ini menunjukkan hasil Secara parsial variabel PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian dilakukan oleh Sandry Yossi, dkk (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013)” hasilnya ini menunjukkan bahwa variabel Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal dan variabel pajak daerah dan retribusi secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 7% terhadap variabel belanja modal, sedangkan sebesar 93% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian oleh Rachmi Intani (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016” penelitian ini menyatakan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, retribusi daerah berpengaruh

positif terhadap belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

METODE

Ruang lingkup dan objek penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel Dependen (Y) adalah Belanja Modal kab/kota di Kalimantan Selatan, variabel Independen (X1) adalah Pajak Daerah kab/kota di Kalimantan Selatan, variabel Independen (X2) adalah Retribusi Daerah kab/kota di Kalimantan Selatan, variabel Independen (X3) adalah Dana perimbangan kab/kota di Kalimantan Selatan, variabel Independen (X4) adalah SiLPA kab/kota di Kalimantan Selatan. Data di ambil dari DJPK kemenku kabupaten/kota Kalimantan Selatan tahun 2011-2019.

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di ambil dari DJPK.kemenku kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Data bersifat *time series* dan *cross section* yaitu gabungan dari kedua data disebut data panel dengan periode 2011 - 2019.

Metode analisis

Penelitian ini menggunakan *Generalized Least Square (GLS)*, digunakan untuk melihat Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Widarjono (2009) model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan model *random effect* menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares (GLS)* sehingga tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan apabila syarat tersebut terpenuhi maka model regresi linear tersebut dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*), dan asumsi kalsik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar valid sebagai alat penduga. Secara matematis model persamaan yang digunakan pada penlitian ini adalah data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series* sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \mu$$

Dimana :

Y	= Belanja Modal	$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= parameter yang diukur
X1	= Pajak Daerah	α	= konstanta
X2	= Retribusi Daerah	i	= kab/koat di kalimantan selatan
X3	= Dana Perimbangan	t	= 2015-2019
X4	= SiLPA	μ	= error

Pada analisis regresi untuk mepermudah persamaan, maka persamaan tersebut di transform kedalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln}X1_{it} + \beta_2 \text{Ln}X2_{it} + \beta_3 \text{Ln}X3_{it} + \beta_4 \text{Ln}X4_{it} + \mu$$

Dimana :

LnY	= Belanja Modal	$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= parameter yang diukur
LnX1	= Pajak Daerah	α	= konstanta
LnX2	= Retribusi Daerah	i	= kab/kota di kalimantan selatan
LnX3	= Dana Perimbangan	t	= 2015-2019
LnX4	= SiLPA	μ	= error

Sebelumnya pada penelitian ini memerlukan adanya pengujian asumsi klasik

1. Uji Asumsi Klasik

Dalam mengambil kesimpulan hasil regresi, jadi model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Pada penelitian ini menggunakan penelaahan uji normalitas dan uji multikolinearitas.

2. Uji statistik

Selanjutnya dilakukan uji Statistik terdiri dari uji F, uji T, dan uji R^2 (koefisien determinasi) sebagai berikut :

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Variabel Penelitian

Belanja Modal

Pada provinsi Kalimantan selatan kita dapat melihat perbandingan belanja modal pada kabupaten dan kota pada waktu 3 tahun terakhir. Data belanja modal pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada 3 tahun terakhir pada kab. Banjar, HSS, HSU, Tapin, kota Banjarmasin, dan kab. Tanahumbu yang mengalami peningkatan, sedangkan pada kabupaten lainnya fluktuatif atau tidak stabil. Hal mungkin saja disebabkan kondisi perekonomian yang kurang stabil/baik sehingga pendapatan daerah kurang stabil/terrealisasi dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah merupakan pendanaan terhadap belanja daerah dimana belanja modal merupakan hal dari belanja tersebut, dimana belanja modal merupakan pengadaan aset tetap dan menambah nilai aset sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pajak Daerah

Berikut ini perbandingan realisasi pajak daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2017-2019 pada kabupaten Banjar, kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah laut, Tapin, kota Banjarbaru, kota Banjarmasin, dan kabupaten Balangan makin meningkat dalam 3 tahun. Hal ini akan terus meningkat apabila pembangunan daerah makin meningkat dan diiring meningkatnya kendaraan bermotor, pembangunan hotel, tempat hiburan, dan parkir hal berdampak positif terhadap peningkatan pajak daerah pada pendapatan daerah.

Retribusi Daerah

Berikut ini perbandingan realisasi retribusi daerah pada kabuapten dan kota di Kalimantan Selatan tahun 2017-2019, data retribusi daerah fluktuatif atau tidak stabil pada beberapa kabupaten dan kota, sedangkan kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan pada Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong, Banjarmasin, dan Tanah Laut. Hal mungkin saja disebabkan kondisi perekonomian yang kurang stabil/baik sehingga retribusi daerah kurang stabil/terrealisasi dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dimana retribusi daerah bagian dari pendapatan asli daerah dimana merupakan pendanaan dalam pembanguan daerah.

Dana Perimbangan

Berikut ini perbandingan realisasi dana perimbangan pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tahun 2017-2019, pada data dana perimbangan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini harus di perhatikan sebab dana perimbangan merupakan sumber pendanaan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diharapkan penggunaan pendaan dari dana perimbangan dapat digunakan secara optimal.

SiLPA

Pada data SiLPA dalam kurun waktu 3 tahun 2017-2019 pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, sisa lebih perhitungan anggaran yang meningkat tiap tahunnya pada kabupaten Hulu Sungai Tengah, kota Banjarbaru, kota Banjarmasin, dan kabupaten Tanah Bumbu, terdapat di beberapa kabupaten dan kota mengalami peningkatan pada SiLPA diharapkan penggunaan pendanaan daerah dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Hal ini harus diperhatikan sehingga SiLPA digunakan secara optimal dan pendanaan tiap periode digunakan dengan optimal.

Analisis Data

Model persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal di Pengaruhi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, penelitian ini menggunakan *Generalized Least Square (GLS)*. Sebelumnya pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

Uji Asumsi Klasik

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari :

Uji Normalitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya normalitas pada model regresi menggunakan metode uji Jarque-Bera. Dari hasil data dapat dilihat nilai prob.JB hitung sebesar 0,982074 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan residu terdistribusi normal, artinya asumsi klasik tentang kenormalan pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antar variabel independen, pada model regresi dapat diketahui dari koefisien yang melebihi 0,80 antara dua variabel independen menjadi petanda terjadi masalah multikolinearitas serius. Hasil uji multikolinearitas pada kab/kota di Kalimantan Selatan menunjukkan tidak terdapat nilai yang berkorelasi tinggi antar variabel independen, tidak melebihi 0,80 dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Hasil regresi linear berganda

Tabel 1

Hasil Analisis Regresi Data Panel di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2019

Variabel	CEM	FEM	REM
Constant	5.359 (3.502)	-5.594 (4.492)	5.359 (3.305)
Variabel Independen :			
Pajak Daerah (X1)	0.036 (0.034)	0.007 (0.070)	0.036 (0.032)
Retribusi Daerah (X2)	0.018 (0.046)	0.228 (0.070) ***	0.018 (0.044)
Dana Perimbangan (X3)	0.710 (0.130) ***	0.960 (0.182) ***	0.710 (0.123) ***
SiLPA (X4)	0.010 (0.003) ***	0.010 (0.003) ***	0.010 (0.003) ***
Diagnostics :			
Total observasi		117	
Jumlah observasi		13	
Jumlah tahun		9	
F-statistic	23.424 ***	8.182 ***	23.424 ***
R-squared	0.456	0.567	0.456
Ads R-squared	0.436	0.498	0.436
SE of regresion	0.281	0.266	0.281
Chow Test (prob>F)		0.020	
Hausman Test (prob>chi2)			0.0006
simbol signifikan : *** alpha 1%, ** alpha 5%, * alpha 10 %, tidak berbintang berarti tidak signifikan			

Sumber : Data diolah *evIEWS 9*

Pada analisis regresi data panel dapat dilihat hasil dari pengujian permodelan data panel yaitu berdasarkan perbandingan uji chow dan uji hausman dapat dilihat nilai prob < alpha 0,05 maka model FEM yang di pilih, berdasarkan F-statistik dari ketiga model signifikan, model pada data FEM memiliki nilai R-squared yang tinggi yaitu 0.567 sedangkan model REM R-squared hanya 0.456, berdasarkan pertimbangan tersebut maka model yang tepat dan baik untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu model metode REM

Dari hasil analisis regresi model REM, maka dapat diolah persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5.359 + 0.036 X1 + 0.018 X2 + 0.710 X3 + 0.010 X4$$

$$\text{Prob} = 0.2662 X1 \quad 0.6736 X2 \quad 0.0000 X3 \quad 0.0015 X4$$

- Konstan pada persamaan regresi memiliki arah positif (5.359) menyatakan bahwa jika seluruh variabel independen sama dengan nol (0) maka belanja modal akan naik sebesar 5,36 %.
- Pajak Daerah (X1) mempunyai koefisien sebesar 0.036 bertanda positif menunjukkan jika pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka pendanaan belanja modal naik sebesar 0.2662 dengan asumsi variabel lainnya tetap (ceteris paribus).
- Retribusi Daerah (X2) mempunyai koefisien sebesar 0.018 dan bertanda positif, artinya menunjukkan bahwa jika retribusi daerah meningkat sebesar 1% maka belanja modal meningkat sebesar 0.6736 dengan asumsi variabel-variabel lainnya tetap (ceteris paribus).
- Dana Perimbangan (X3) mempunyai nilai sebesar 0.710 bertanda positif menunjukkan jika dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 1% maka pendanaan belanja modal meningkat sebesar 0.0000 dengan asumsi variabel lainnya tetap (ceteris paribus).
- SiLPA (X4) mempunyai nilai sebesar 0.010 bertanda positif menunjukkan jika SiLPA mengalami peningkatan sebesar 1% maka pendanaan belanja modal meningkat sebesar 0.0015 dengan asumsi variabel lainnya tetap (ceteris paribus).

Uji Statistik

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil analisis tabel menggunakan eviews 9, nilai F_{hitung} sebesar 23.424 dan probabilitas F sebesar 0.000 dalam taraf signifikan prob.F hitung < 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi yang diestimasi layak untuk digunakan menjelaskan pengaruh pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dana perimbangan (X3) dan SiLPA (X4) terhadap variabel terikat belanja modal (Y).

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel **pajak daerah** memiliki T_{hitung} sebesar 1.118 dan probabilitasnya sebesar 0.2662, maka variabel pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0.036 menunjukkan pajak daerah memiliki nilai positif artinya pajak daerah memiliki hubungan yang searah terhadap belanja modal di kab/kota di Kalimantan Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel **retribusi daerah** memiliki T_{hitung} sebesar 0.422 dan probabilitasnya sebesar 0.6736, maka variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0.018 menunjukkan retribusi daerah memiliki nilai positif artinya retribusi daerah memiliki hubungan yang searah terhadap belanja modal di kab/kota di Kalimantan Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel **dana perimbangan** memiliki T_{hitung} sebesar 5.772 dan probabilitasnya sebesar 0.0000, maka variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0.710 menunjukkan dana perimbangan berpengaruh positif artinya dana perimbangan memiliki hubungan yang searah dan berpengaruh terhadap terhadap belanja modal di kab/kota di Kalimantan Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel **SiLPA** memiliki T_{hitung} sebesar 3.247 dan probabilitasnya sebesar 0.0015, maka variabel SiLPA berpengaruh signifikan

dan nilai koefisiensi regresi sebesar 0.010 menunjukkan SiLPA berpengaruh positif artinya SiLPA memiliki hubungan yang searah dan berpengaruh terhadap belanja modal di kab/kota di Kalimantan Selatan.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan determinasi pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan diperoleh angka R-squared sebesar 0.456, maka didapat nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 45.6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen : pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan SiLPA mampu menerangkan variabel dependen : belanja modal sebesar 45.6% selebihnya 54.4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam variabel penelitian.

Pembahasan Hasil Analisis

Analisis data pada penelitian ini adalah data panel bertujuan untuk mengetahui apakah belanja modal dipengaruhi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan SiLPA di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2011-2019, serta variabel apakah yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, pajak daerah pada kab/kota di Kalimantan Selatan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai prob. 0.2662 dan nilai koefisien bernilai positif yaitu 0.036 dapat dilihat dari hasil uji T, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pajak daerah akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 3,6 adanya hubungan positif antara pajak daerah terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan pajak daerah memiliki hubungan yang searah terhadap belanja modal. Pajak daerah pada kab/kota di Kalimantan Selatan tidak signifikan hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sangat tergantung pada aliran dana transfer atau dana perimbangan sebagai pembiayaan pembangunan dan pemerintahan daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari APBD kab/kota di Kalimantan Selatan di beberapa tahun terakhir, pada dana perimbangan memiliki aliran dana yang tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, ini menunjukkan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer atau dana perimbangan.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, retribusi daerah pada kab/kota di Kalimantan Selatan tidak berpengaruh signifikan dapat dilihat dari uji T pada tabel 3, dengan nilai prob. 0.6736 dan nilai koefisien bernilai positif yaitu 0.018 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 1,8 % dan sebaliknya. Adanya hubungan positif antara retribusi daerah terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan retribusi daerah memberikan hubungan searah tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah pada kab/kota di Kalimantan Selatan tidak signifikan hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sangat tergantung pada aliran dana transfer atau dana perimbangan sebagai pembiayaan pembangunan dan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari APBD kab/kota di Kalimantan Selatan, pada dana perimbangan memiliki aliran dana yang tinggi dan meningkat di beberapa tahun terakhir dibandingkan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di beberapa tahun terakhir ini menunjukkan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer atau dana perimbangan.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dana perimbangan berpengaruh signifikan dapat dilihat pada uji T pada tabel 3 dengan prob. 0.0000 dan nilai koefisien bernilai positif yaitu 0.710 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 71% dan sebaliknya. Adanya hubungan positif antara dana

perimbangan terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sangat tergantung pada aliran dana transfer atau dana perimbangan sebagai pembiayaan pembangunan dan pemerintahan daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari APBD kab/kota di Kalimantan Selatan, dana perimbangan memiliki aliran dana yang tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah ini menunjukkan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer atau dana perimbangan.

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, SiLPA berpengaruh signifikan dapat dilihat pada uji T pada tabel 3 dengan prob. 0.0015 dan nilai koefisien bernilai positif yaitu 0.010 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% SiLPA akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 1% dan sebaliknya. Adanya hubungan positif antara SiLPA terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. SiLPA (dengan huruf i kecil) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran, yang dimana SiLPA ialah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Pelampauan pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan Infrastruktur pembangunan daerah.

PENUTUP

Implikasi

Implikasi Teoritis

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandry Yossi, dkk (2015) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten Bolaang Mongondow, hal tersebut disebabkan pemerintah tersebut lebih tergantung kepada dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Intani (2018) terdapat pengaruh positif dana perimbangan terhadap belanja modal, ini menunjukkan bahwa ada hubungan searah dana perimbangan terhadap belanja modal, dimana dana perimbangan diberikan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan yang terjadi antar daerah.

SiLPA berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ifa (2017) terdapat pengaruh signifikan positif SiLPA terhadap belanja modal. SiLPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran, yang dimana SiLPA ialah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Pelampauan atau sisa lebih anggaran pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan Infrastruktur pembangunan daerah .

Implikasi Praktis

Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini yang dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah : mengoptimalkan penggunaan pendanaan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah agar dapat pengalokasiannya untuk meningkatkan belanja daerah untuk pembangunan daerah dan dana perimbangan dan SiLPA harus dialokasikan secara baik dan optimal untuk pembiayaan belanja seperti belanja modal.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Data pada penelitian ini hanya menggunakan 9 tahun observasi penelitian, karena keterbatasan data yang didapatkan, data

penelitian ini tidak menggunakan data penelitian tahun terbaru, karena tahun terbaru sulit didapatkan, keterbatasan variabel yang diteliti oleh peneliti. Peneliti hanya menggunakan 4 variabel saja, padahal memungkinkan ada variabel lain yang mempengaruhi belanja modal, keterbatasan buku sebagai bahan pendukung dan bacaan penelitian ini, karena peneliti hanya mencari bahan pendukung dan bacaan penelitian di internet.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini sebagai berikut : 1. Pajak daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tidak signifikan terhadap belanja modal dan memiliki nilai yang positif. Adanya hubungan positif antara pajak daerah terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan pajak daerah memberikan hubungan searah tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. 2. Retribusi daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tidak berpengaruh signifikan. Adanya hubungan positif antara retribusi daerah terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan retribusi daerah memberikan hubungan searah tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 3. Dana perimbangan pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, adanya hubungan signifikan positif antara dana perimbangan terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan dana perimbangan berpengaruh searah terhadap belanja modal. 4. SiLPA pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, adanya hubungan signifikan positif antara SiLPA terhadap belanja modal memberikan arti bahwa peningkatan atau penurunan SiLPA berpengaruh searah terhadap belanja modal. 5. Secara simultan atau bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 6. Koefisien determinasi berdasarkan hasil perhitungan determinasi pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan diperoleh angka sebesar 0.456. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 45.6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya dapat menerangkan variabel dependen sebesar 45.6% selebihnya 54.4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam variabel penelitian.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan : a). mengoptimalkan penggunaan pendanaan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah agar dapat pengalokasiannya untuk meningkatkan belanja daerah untuk pembangunan daerah. b). Dana perimbangan dan SiLPA harus dialokasikan secara baik dan optimal untuk pembiayaan belanja seperti belanja modal untuk peningkatan pembangunan daerah sehingga perekonomian daerah meningkat. 2. Bagi masyarakat : a). Masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dengan membayar pajak tepat waktu, serta membayar retribusi daerah atas jasa yang didapatkan oleh pemerintah. b). Masyarakat sebagai pengguna dan pengawas pembangunan infrastruktur daerah diharapkan menjaga dan mengawasi pemerintahan daerah dan dapat memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. 3. Bagi peneliti selanjutnya : a). Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan rentang waktu yang lebih panjang. b). Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambah variabel independen lain untuk memperoleh hasil yang lebih relevan dan berpengaruh terhadap belanja modal.

BIBLIOGRAPHY

- Amri, Nur Fadhila. (2019). *Pengertian Belanja Modal, Jenis dan Kriteria Belanja Modal*. <<https://www.e-akuntansi.com/pengertian-belanja-modal-jenis-dan-kriteria-belanja-modal/>> (diakses pada tanggal 21 april 2020)
- Anonim. (2013). *Pengertian Dana Perimbangan atau Dana Transfer*.

- <<https://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/12/pengertian-dana-perimbangan-atau-dana.html>> (diakses pada tanggal 21 april 2020)
- Anonim. (2019). *Uji Asumsi Multikolinearitas Dengan Eviews*.
<<https://www.marisscience.com/2019/04/uji-asumsi-multikolinearitas-dengan.html>> (diakses pada tanggal 30 agustus 2020)
- Anonim. (2019). *Pengertian Dana Perimbangan Adalah: Fungsi dan Jenisnya*.
<<https://www.pengadaan.web.id/2019/04/pengertian-dana-perimbangan-adalah.html>>(diakses pada tanggal 12 Februari 2020)
- Anonim. (2018). *Tutorial Regresi Data Panel dengan Eviews 9 (bagian 2)*.
< <https://catatanis.wordpress.com/2018/07/17/tutorial-regresi-data-panel-dengan-eviews-9-bagian-2/> > (diakses pada tanggal 23 juni 2020)
- Anonim. *Profil Provinsi Kalimantan Selatan*. < <https://kalsel.bpk.go.id/profil-provinsi-kalimantan-selatan/> > (diakses pada tanggal 1 maret 2021)
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab/Kota (Persen) 2007-2018*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Apa saja sumber-sumber pendapatan daerah*.
<<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>> (diakses pada tanggal 12 Februari 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Apa yang dimaksud dengan silpa* <<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa> > (diakses pada tanggal 2 maret 2021)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2019). *Realisasi APBD 2007-2018*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2021). *Realisasi APBD 2019*.
- Gischa, Serafica. (2020). *APBD: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, dan Tujuannya*.
<<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd--pengertian-unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all>> (diakses pada tanggal 21 april 2020)
- Hendryadi. (2012). *Regresi Data Panel*.
<<https://teorionline.wordpress.com/2012/01/06/regresi-data-panel/>> (diakses pada tanggal 4 maret 2021)
- Hidayat, Anwar. (2017). *Pengertian Uji Asumsi Klasik*.
<<https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html>> (diakses pada tanggal 1 oktober 2020)
- Hidayat, Anwar. (2018). *Penjelasan dan Tutorial Regresi Linear Berganda - Uji Statistik*.
<<https://www.statistikian.com/2018/01/penjelasan-tutorial-regresi-linear-berganda.html>> (diakses pada tanggal 2 april 2020)
- Hidayat, Anwar. (2018). *Uji F dan Uji T - Uji Statistik – Statistikian*.
<<https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>> (diakses pada tanggal 2 april 2020)
- Intani, Rachmi. (2018). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah tahun 2012-2016*. Skripsi FE. Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ifa, Khoirul. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR*. Jawa Timur : Jurnal STIE Widya Gama Lumajang Vol. 02, No. 01.

- Indra Praza, Eko. (2016). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi*. Jambi : Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*
- Indonesia, R. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*
- Indonesia, R. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang KLASIFIKASI ANGGARAN*
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Iqbal, Mujammad. (2015). Regresi Data Panel (1) “Pengenalan”
< <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-1-pengenalan/> > (diakses pada tanggal 11 juni 2020)
- Iqbal, Mujammad. (2015). Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis”
< <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/> > (diakses pada tanggal 11 juni 2020)
- Jikwa, Efendi. Agustinus Salle. Paulus K. Allo Layuk. (2017). *PENGARUH PENDAPATAN TRANSFER DAN SILPA TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH*. Mamberamo tengah : Jurnal Keuda Vol. 2 No. 2.
- Mardani, R. (2017). *Cara Baca Hasil Regresi Eviews*.
<<https://mjurnal.com/skripsi/cara-baca-hasil-regresi-eviews-interpretasi-hasil-regresi/>> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2020)
- Maulida, Rani. (2018). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*.
<<https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>> (diakses pada tanggal 21 maret 2020)
- Sandi, Fajar Billy. (2019). *Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah*. <<https://www.online-pajak.com/retribusi-daerah>> (diakses pada tanggal 21 maret 2020)
- Satria, dias. Analisis regresi: model data panel
< <https://www.diassatria.com/analisis-regresi-model-data-panel/> > (diakses pada tanggal 2 maret 2021)
- Sudika, I Komang dan I Ketut Budiarta. (2017). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi bali*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 21.2.
- Suparmoko, M. (2001). *EKONOMI PUBLIK Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah edisi pertama*. Purwokerto: ANDI YOGYAKARTA.
- Yossi Mamonto, Sandry . J.B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. (2015). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.